

Akhir Bulan, KPU Lebak Mulai Geser Logistik Pilkada ke PPK

written by Kabar 6 | 21 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Beberapa jenis logistik untuk kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sudah diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak.

Ketua KPU [Kabupaten Lebak](#) Dewi Hartini mengatakan, logistik yang disimpan di gudang KPU Lebak akan mulai didistribusikan ke kecamatan pada akhir bulan Oktober.

“Distribusi akan kita bagi dua tahap. Untuk kebutuhan yang di luar kotak suara seperti bilik direncanakan mulai 28 Oktober sudah mulai didistribusikan,” kata Dewi kepada [Kabar6.com](#), Senin (21/10/2024).

**Baca Juga: [Temukan Indikasi Pelanggaran, Mahasiswa Baros Minta Kades Netral di Pilkada 2024](#)

Sedangkan kata Dewi, untuk jenis logistik yang didistribusikan bersamaan kotak suara masih harus menunggu surat suara. Ia

memperkirakan, surat suara baru akan masuk ke gudang pada tanggal 5 November.

“Jumlah surat suara sesuai dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) ditambah 2,5 persen dikali 2 lembar (surat pemilihan),” ucap Dewi.

Kata dia, KPU Lebak telah melakukan mitigasi untuk mencegah kerusakan logistik akibat terjadi cuaca buruk saat proses distribusi secara berjenjang hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Sudah (melakukan mitigasi) agar distribusinya juga semaksimal mungkin, bisa safety, tidak kehujanan dan lain-lain,” katanya. (Nda)

Monitoring Pelantikan Pantarlih, PPK Penukal Utara – PALI Harapkan Pantarlih Bekerja Maksimal

written by Kabar 6 | 21 Oktober 2024



Kabar Sumsel – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), melakukan monitoring pelantikan pantarlih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Ketua PPK Penukal Utara, Eko Marhen melakukan monitoring bersama Anggota PPK divisi Data dan Informasi di Desa Tempirai Raya – sebutan dari Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Selatan dan Desa Tempirai Timur.

Sementara, Anggota PPK divisi Hukum dan Pengawasan, Didit Ardiansyah melakukan monitoring di Desa Muara Ikan, Desa Prabumenang dan Desa Lubuk Tampui. Lalu, Anggota PPK divisi Teknis melakukan monitoring di Desa Tanjung Baru, Desa Sukarami dan Desa Tambak.

Kemudian, Anggota PPK lainnya divisi SDM, Arjuna melakukan monitoring di Desa Karang Tanding, Desa Tanding Marga dan Desa Kota Baru.

“Alhamdulillah hari ini kami melakukan monitoring pelantikan pantarlih 13 Desa di Kecamatan Penukal Utara, semuanya berjalan dengan lancar,” ujar Arjuna, Senin (24/6/2024).

Sementara, Didit juga menambahkan sebanyak 64 pantarlih yang

dilantik hari ini diharapkan dapat menjalankan amanah dengan baik untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap calon pemilih di Pilkada serentak ini.

“Kami berharap teman-teman pantarlih dapat bekerja semaksimal mungkin. Karena dalam proses ini awal pendataan pemilih, sebab data ini sangat penting dalam Pilkada ini,” katanya.

Pelantikan pantarlih dilakukan serentak di PPS Desa masing-masing. Usai pelantikan langsung digelar bimbingan teknis untuk para pantarlih. Langkah tersebut untuk menambah pengetahuan para pantarlih untuk turun ke lapangan.

“Usai bimtek ini langsung bersiap-siap melakukan coklit. Sebab mulai tanggal 24 Juni – 24 Juli masa kerja pantarlih. Kami harapkan dapat bekerja sebaik mungkin,” kata Sudianto.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menerima para petugas pantarlih untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian untuk pilkada ini. (Oke)

Telan 14 M, BPK Temukan Kekurangan Volume dan Kualitas Proyek RSUD Ciligrang Lebak

written by Kabar 6 | 21 Oktober 2024



Kabar6- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan pada proyek pembangunan lanjutan RSUD Ciligrang di Kabupaten Lebak, Banten.

Permasalahan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

Proyek rumah sakit perbatasan antara Kabupaten Lebak dan Sukabumi Jawa Barat dibawah Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten. ****Baca Juga: [Perbaikan Intake Pintu Air 10, Perumdam TKR Tetap Maksimalkan Layanan](#)**

Total proyek tersebut Rp14.121.773.376 dikerjakan CV AJU berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/4162/SPK/Kes-Yan/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023. Pekerjaan tersebut telah dibayar sebesar Rp14.121.773.376.

Namun saat dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp331.272.839,56.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan atas item pekerjaan antara lain pekerjaan arsitektur, pagar, perkerasan jalan, kanstein, pagar hollow, dan pembesian sebesar Rp331.272.839,56.

BPK juga menemukan bahwa kualitas pekerjaan paving block tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen

perencanaan teknis pekerjaan. Nilai ketidaksesuaian spesifikasi ini sebesar Rp145.497.174,39.

“PPK menjelaskan bahwa PPK tidak mengetahui terkait spesifikasi paving K-300 yang tercantum dalam dokumen perencanaan teknis pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung RSUD Ciligrang tersebut,” demikian bunyi LHP BPK RI perwakilan Banten.

Tak hanya hanya kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi, dalam pengerjaannya mengalami keterlambatan selama 16 hari. Atas keterlambatan tersebut, telah dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp203.557.093,71.

Atas kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut, pihak Dinas Kesehatan telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp50.000.000.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti belum merespon telpon dan pesan WhatsApp yang dikirim kabar6.com saat dikonfirmasi terkait temuan BPK atas pembangunan RSUD Ciligrang tersebut. (Aep)

BK Panggil KPU Lebak soal Surat Berkop DPRD Rekomendasikan Sejumlah Nama sebagai PPK

written by Kabar 6 | 21 Oktober 2024



Kabar6-Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lebak memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak, Jumat (31/5/2024).

Pemanggilan itu terkait beredarnya surat berkop DPRD Lebak yang merekomendasikan sejumlah nama untuk diprioritaskan sebagai panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pilkada 2024.

Surat yang dibubuhi stempel DPRD Lebak dengan mencantumkan nama Wakil Ketua DPRD Lebak Junaedi Ibnu Jarta beserta tanda tangan itu tertanggal 8 Mei 2024.

****Baca Juga:** [Pemkab Lebak Manfaatkan Tanah 52 Hektare untuk Bangun Agrowisata Cikapek](#)

Kepada wartawan, Juru Bicara BK DPRD Lebak Musa Weliansyah mengatakan, surat itu bukan dibuat oleh unsur pimpinan DPRD sebagaimana yang tercantum didalamnya.

“Bukan, surat itu bukan dibuat oleh pimpinan DPRD, ketua tidak tahu itu. Surat itu dibuat atas inisiasi TA (tenaga ahli) salah satu pimpinan DPRD,” kata Musa.

Musa menyebut, untuk membuat surat tersebut, tenaga ahli yang dimaksud menyuruh salah seorang staf pimpinan DPRD.

“Staf juga sudah mengakui bahwa dia yang membuat, dan itu

karena disuruh oleh tenaga ahli itu,” ujar Musa.

“Kalaupun ada beberapa dari nama-nama yang tercantum di dalam surat tersebut lolos seleksi, menurut komisioner KPU Lebak itu hanya kebetulan saja,” tambah politisi PPP ini.

Dari keterangan yang diperoleh BK DPRD, surat tersebut tidak pernah disampaikan kepada ketua dan komisioner KPU Lebak.

“Surat itu tidak pernah diberikan ke KPU, karena staf ini juga tidak punya koneksi ke sana,” ucap Musa.

Dari pendalaman yang dilakukan, BK DPRD menduga, surat itu hanya diperlihatkan ke nama-nama tersebut untuk meyakinkan bahwa mereka memang mendapat rekomendasi dari DPRD.

“Hanya untuk memastikan 29 orang itu direkomendasikan. Untuk memberi jawaban ke orang-orang yang dia bawa. Jadi TA ini membawa beberapa orang supaya lolos PPK,” pungkas Musa.(Nda)

PPK Pilkada Dilantik, KPU Lebak Wanti-wanti soal Godaan Penyelenggara

written by Kabar 6 | 21 Oktober 2024



Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak melantik 140 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk bertugas pada Pilkada 2024, di Hotel Mutiara, Kalanganyar, Lebak, Kamis (16/5/2024).

Ketua KPU Lebak Dewi Hartini mengatakan, usai dilantik, para anggota PPK akan menjalani bimbingan teknis (bimtek) dalam menghadapi tahapan Pilkada.

****Baca Juga:** [Dindik Lebak Keluarkan Edaran, Larang Sekolah Adakan Study Tour](#)

“Dimulai dari melakukan pemutakhiran data pemilih di kecamatan masing-masing,” kata Dewi.

Dewi berpesan kepada PPK untuk melaksanakan tugas dan tahapan pilkada dengan sebaik-baiknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pakta integritas yang dibaca merupakan janji yang harus ditepati.

Ia juga mengingatkan bahwa PPK sebagai penyelenggara pemilihan tidak tergiur dengan godaan dari pihak-pihak tertentu.

“Jadi penyelenggara godaannya luar biasa, pakta integritas yang tadi ditandatangani harus menjadi acuan. PPK itu amanah yang kapan saja bisa diganti jika bapak ibu tidak melaksanakan

pakta integritas tersebut,” jelas Dewi.

Dewi menyinggung agar persoalan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin menjadi introspeksi dan pendewasaan agar tidak terulang kembali pada Pilkada.

“Soal polemik di Gunungkencana kami harap tidak terjadi lagi. Kami pastikan ketika ada aduan masyarakat lalu terbukti, itu akan menjadi evaluasi dan kita punya banyak pengganti,” tegas Dewi.

Anggota KPU Banten Munawar meminta PPK terpilih tidak mengecewakan lembaga dan masyarakat.

“Buktikan bahwa bapak ibu adalah PPK hasil seleksi terbaik, jawab itu dengan kinerja dalam menjalankan nilai-nilai penyelenggara.

“Bangun komunikasi, konsolidasi dan kolaborasi di internal. Kalau itu sudah terbangun maka pelaksanaan di kecamatan bisa berjalan sukses, dan kita harus berkomitmen menjaga proses pilkada,” katanya.(Nda)

Kemenperin Bongkar Kasus Penipuan SPK Fiktif, ini Modusnya

written by Kabar 6 | 21 Oktober 2024



Kabar6-Kementerian Perindustrian merespons serius pengaduan masyarakat terkait beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) yang diduga bermasalah di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Direktorat IKHF) Tahun Anggaran 2023.

“Terhadap pengaduan tersebut, [Kemenperin](#) telah melakukan pemeriksaan internal dan menemukan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Sdr. LHS yang menyalahgunakan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat IKHF,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Senin (6/5/2024).

****Baca Juga:**[Korupsi Proyek Breakwater Cituis Tangerang, AS ASN DKP Banten Ditetapkan Tersangka](#)

Jubir Kemenperin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal, seluruh paket pekerjaan yang diadakan tersebut tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023 karena paket pekerjaan dimaksud memang tidak terdapat dalam alokasi DIPA Kemenperin Tahun Anggaran 2023.

“Hasil pemeriksaan internal kami menemukan adanya penipuan yang dilakukan oleh Sdr. LHS dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif. Yang perlu ditegaskan adalah kasus ini tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara,” jelas Febri.

Perbuatan ini dilakukan oleh oknum pegawai berinisial LHS yang mengatasnamakan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi. Sdr. LHS membuat Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak lain seolah-olah SPK tersebut merupakan SPK resmi dari Kementerian Perindustrian.

“Perbuatan Sdr. LHS ini tidak diketahui ataupun diperintahkan oleh atasan atau pimpinannya dan merupakan perbuatan pribadi yang bersangkutan,” tegas Febri.

Dari laporan/pengaduan yang masuk, terdapat SPK fiktif yang diterbitkan oleh LHS selaku PPK untuk kegiatan Fasilitasi Pendampingan IKHF. Salah satu di antaranya senilai Rp23 miliar. Nilai tersebut tidak sesuai dengan anggaran dan jenis kegiatan Fasilitasi Pendampingan IKHF sebagaimana tercantum dalam DIPA Direktorat IKHF Tahun 2023 yang hanya sebesar Rp590 juta dari total pagu anggaran sebesar Rp10 miliar.

Kemenperin sedang melakukan proses penindakan atas pelanggaran disiplin berat dengan hukuman maksimal pemecatan. Yang bersangkutan saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai PPK.

Kementerian Perindustrian tidak *mentolerir* dan akan menindak tegas perbuatan-perbuatan pelanggaran sejenis.

Febri menegaskan, Kemenperin membongkar kasus ini kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen Menteri Perindustrian untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dimaksud akan dilakukan penindakan.

“Selanjutnya, kami mengimbau masyarakat termasuk para penyedia jasa untuk memperhatikan secara seksama kegiatan-kegiatan pengadaan barang jasa di Kemenperin melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” tutup Febri. (ir)

Dibuka Besok, Pendaftaran Calon Anggota PPK Pilkada Lebak

written by Kabar 6 | 21 Oktober 2024



Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak bakal kembali merekrut badan ad hoc terdiri dari anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Badan ad hoc yang direkrut dengan metode seleksi terbuka berdasarkan Keputusan KPU RI untuk ditugaskan pada perhelatan

[Pilkada Lebak](#) yang akan digelar bulan November 2024 nanti.

Kasubag Hukum dan SDM KPU Lebak Devi Yustiadi mengatakan, pengumuman sekaligus penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dimulai dari tanggal 23 sampai 29 April 2024.

**Baca Juga: [RSCM Sukses Transplantasi Hati Pasien dengan Komorbid Sirosis Hati](#)

“Besok mulai diumumkan sekaligus penerimaan pendaftaran calon anggota PPK Pilkada 2024. Perpanjangan masa pendaftaran 30 April sampai 2 Mei 2024,” kata Devi, di Kantor KPU Lebak, Jalan Abdi Negara, Rangkasbitung, Senin (22/4/2024).

Devi menjelaskan, mengenai persyaratan maupun kelengkapan dokumen tidak ada yang beda antara pendaftaran PPK pemilu dengan pilkada.

“Persyaratan dan kelengkapan dokumen tidak ada yang beda seperti rekrutmen pada saat pemilu. Pendaftaran melalui Siakba, dan teman-teman yang sudah punya akun bisa menggunakan akun yang sudah ada, hanya nanti ada pilihan untuk pilkada,” papar Devi.

Sama hal nya saat pemilu pada 14 Februari lalu, KPU Lebak di pilkada nanti membutuhkan sebanyak 140 anggota PPK. Di mana masing-masing kecamatan terdiri dari 5 orang, terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota PPK.(Nda)

KPU Banten Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu

2024

written by Kabar 6 | 21 Oktober 2024



Kabar6- KPU Provinsi Banten memulai rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 pada hari ini, Kamis (7/3). Rapat pleno ini dijadwalkan berlangsung hingga 10 Maret 2024.

“Kami menjadwalkan mulai tanggal 7-10, mudah-mudahan sebelum tanggal 10 sudah selesai,” ujar Ketua [KPU Banten](#) Muhammad Ihsan.

Ihsan menjelaskan bahwa rapat pleno terbuka merupakan tahapan lanjutan dari rekapitulasi suara yang telah dilakukan di tingkat PPK dan KPU kabupaten/kota.

“Pada prinsipnya, proses rapat pleno terbuka sudah dilakukan berjenjang dimulai dari PPK, kemudian di KPU kabupaten/kota, dan sekarang di tingkat provinsi. Kami hanya meneruskan proses sebagaimana tahapan dalam perundang-undangan,” tuturnya.

Ihsan berharap rapat pleno terbuka dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

**Baca Juga: [Polisi Hingga TNI Berjaga Selama Rekapitulasi Suara di KPU Banten](#)

“Harapannya pleno terbuka berjalan dengan baik semuanya. Segala permasalahan yang ada di bawah itu sudah diatasi dan ditangani melalui mekanisme dalam rapat pleno tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Polres Serang Kota telah menyiapkan 20 personel untuk mengamankan [rapat pleno](#) KPU Banten.

“Kita siapkan 20 personel, selain itu kita bekerja sama dengan stakeholder semuanya karena keamanan itu yang paling efektif kita membangun kerjasama,” kata Kapolres Serang Kota Kombes Pol Sofwan Hermanto.

Sofwan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan kerawanan dan membagi ring pengamanan untuk memastikan keamanan selama rapat pleno berlangsung.

“Sudah jauh-jauh hari sudah memetakan kerawanan, termasuk titik-titik area rawan sesuai jam-jam tertentu. Ring pengamanan sudah dibagi, kita dibagi 4 zona, meliputi 3 polsek karena di daerah hukum Polresta membawahi administrasi Kabupaten dan Kota Serang. Jadi setiap zona dipimpin 1 kompol karena setiap polsek juga ada pengendalinya,” tandasnya. (Aep/Dhi)

Buka Kotak Suara, PPS Jelupang dan PPK Serpong Utara Dapat Sanksi

written by Kabar 6 | 21 Oktober 2024



Kabar6-Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) buka kotak suara sebelum pleno di tingkat kecamatan. KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengakui tindakan itu merupakan pelanggaran administrasi.

“Itu adalah langkah yang tidak dibenarkan dan melanggar tata aturan,” kata Ketua [KPU Kota Tangsel](#), M Taufik Mizan, Kamis (22/2/2024).

Dijelaskan, pihaknya telah memanggil seluruh panitia pemungutan suara serta panitia pemilihan kecamatan. PPS di Kelurahan Jelupang dan PPK Serpong Utara diberikan sanksi peringatan keras.

“Kita lakukan klarifikasi dan penelaahan,” jelas Taufik. Ia bilang pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan KPU Banten atas masalah ini.

****Baca Juga: [Belum Pleno KPPS di Jelupang Buka Kotak Suara, Bawaslu Tangsel: Hitung Ulang](#)**

Taufik mengaku, dari 59 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kelurahan Jelupang yang dibuka baru tujuh TPS. “Kami juga meminta rekomendasi Bawaslu apakah pelaksanaannya dilakukan di awal atau akhir penghitungan,” ujarnya.

Ia mengklaim bahwa KPPS buka kotak suara Pemilu 2024 tidak ada instruksi dari [KPU Tangsel](#). Unsur kesengajaan untuk melakukan kecurangan juga disebutkan tidak ada.

KPU Tangsel pastikan suara-suara baik partai politik, paslon presiden/wakil presiden, DPD maupun caleg-caleg yang didalam partai semuanya utuh.

“Karena bukan hanya saksi partai politik, saksi partai politik ada Panwaslu juga disitu, agar lebih cepat nanti perekapan C sertifikat hasil disandingkan dengan C planonya yang belum difoto, maka dikeluarkan untu difoto-foto,” ujar Taufik.(yud)

Belum Pleno KPPS di Jelupang Buka Kotak Suara, Bawaslu Tangsel: Hitung Ulang

written by Kabar 6 | 21 Oktober 2024



Kabar6-Buka kotak suara sebelum pleno rekapitulasi penghitungan suara merupakan tindak pelanggaran. Hal itu dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Jelupang, Kecamatan Serpong Utara.

“Maka kami merekomendasikan agar dilakukan penghitungan suara ulang se-Kelurahan Jelupang,” kata Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Muhamad Acep saat dikonfirmasi kabar6.com, Kamis (22/2/2024).

Menurutnya, [KPPS](#) di Jelupang buka kotak suara dipergokinya langsung. Acep mendokumentasikan pelanggaran itu dengan video.

Sementara itu, Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Tangsel, Antonius Didik Trihatmoko bilang, buka kotak suara tidak boleh sembarangan.

**Baca Juga: [KPPS di Tangsel Wafat Tinggalkan Janin Bayi Usia Delapan Bulan dalam Kandungan Istrinya](#)

“Ada aturannya. Yaitu sebelum pemungutan suara dan setelah dikirimkan ke PPK. Hanya dalam rapat pleno rekapitulasi. Selain itu, ketika sudah menjadi rekomendasi oleh MK. Jadi secara aturan tidak boleh membuka kotak suara. Itu merupakan pelanggaran terhadap proses, aturan dan larangan pembukaan kotak suara,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong Utara, Ahmad Zaini Madun mengaku, KPPS terpaksa membuka kotak suara untuk mempersingkat kerja. Penghitungan satu [TPS](#) di tingkat kelurahan butuh waktu 2,5 jam.

“Ada saksi peserta pemilu, panwascam juga koq pas ngebuka kotak. Itu kesepakatan bersama,” kilahnya.(yud)